

## K O L O M   S i   K L E R K

### Pemerintah dan Kedaulatan Rakyat

Secara historis, negara-negara di berbagai belahan dunia pernah mengalami bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Demikian pula di Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, di tataran bumi nusantara telah berbaran komunitas hukum masyarakat, yakni yang berbentuk "desa" adat otonom, yang pada masa kemudian terintegrasi menjadi wilayah-wilayah kerajaan yang berdaulat. Artinya, telah terjadi pergeseran bentuk pemerintahan dari desa otonom menjadi kerajaan. Pergeseran ini sekaligus membawa perubahan sistem kedaulatan, dari Kedaulatan Rakyat (*volks-sovereignty*) menjadi Kedaulatan Tuhan (*dienst-sovereignty*) yang direduksi menjadi Kedaulatan Raja (*rijks-sovereignty*).

Setelah NKRI terbentuk, perubahan itu tidaklah berhenti. UUD 1945 yang disusun untuk sementara waktu menggariskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan Presidensial. Namun hanya dalam hitungan bulan, sistem Presidensial runtuh dan digantikan oleh sistem pemerintahan Parlemen. Bahkan pada tahun 1949 bentuk negara berubah secara frontal menjadi Negara Serikat.

Pengalaman berbicara bahwa perubahan-perubahan yang sedemikian sering dan fundamental, ternyata membawa iklim kehidupan sosial politik yang tidak menentu. Inilah agaknya yang menjadi alasan utama Soekarno menerbitkan Dekrit pada tahun 1959, serta merubah sistem demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin (*guided democracy*). Sekali lagi, telah terjadi perubahan fundamental. Sebab, demokrasi terpimpin pada hakekatnya adalah Kedaulatan Raja yang mengalami proses modernisasi. Dihadapan sang pimpinan (Presiden) – janggank rakyat – para pembantu Presidenpun tidak memiliki daya upaya sekecil apapun, ibarat pelanduk menghadapi serigala.

Kondisi ini berlangsung terus sampai lahirnya Orde Baru yang bertekad mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Berbagai indoktrinasi dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai yang dikandungnya. Maka, jadilah Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu barang "fana" yang diabadikan; suatu ciptaan karya manusia yang disucikan dan diagungkan. Barang siapa berani berpikir atau berbuat untuk merubah – apalagi menggantinya – berarti melawan negara dan pemerintah yang sah.

Tanpa terasa, kelahiran Orde Baru telah berumur dewasa. Sosok pemuda yang sangat dibanggakan karena prestasinya tadi, tiba-tiba mengalami goncangan yang sangat dahsyat yang mengantarkan pada kematiannya. Orang bertanya-tanya : mengapa bisa terjadi ?

Ternyata, sang Orde Baru juga berniat untuk melakukan dinamisasi terhadap konsep Kedaulatan Raja, sehingga menutup rapat pintu dan jendela bagi kemungkinan masuknya aspirasi dan kehendak rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedaulatan rakyat dinistakan, dan perubahan bentuk atau sistem pemerintah dianggap sebagai racun.

Seiring dengan matinya sang Orde Baru, perubahan bentuk atau sistem pemerintahan seolah mendapat saluran yang seluas-luasnya. Maka, jadilah UUD 1945 diamandemen, Ekaprasetia Pancakarsa (P4) dihapuskan, lembaga kepresidenan secara berangsur-angsur namun pasti melakukan desakralisasi diri, serta berbagai perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Satu tujuan yang ingin dicapai dari perubahan tersebut, yakni mendudukan rakyat pada tempat yang semestinya, serta memberikan porsi peran yang seharusnya. Dengan kata lain, perubahan-perubahan tadi dilakukan untuk mengembalikan Kedaulatan Rakyat. Sebab, rakyatlah yang sesungguhnya "berkuasa" terhadap seluruh negeri ini; serta kepada rakyatlah seluruh penguasa seharusnya takut dan bertanggungjawab.

Bentuk dan sistem pemerintahan hanyalah alat untuk memuaskan dan mensejahterakan masyarakat. Apapun bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut tidaklah ada artinya jika tidak mampu berbuat yang terbaik untuk rakyat. Inilah prinsip konkordansi yang harus selalu diingat oleh para penguasa yang kebetulan sedang diberi amanat atau kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Akankan pemerintahan kita mampu mengemban amanat kedaulatan rakyat itu ? Marilah kita awasi bersama.